

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau *Decision Support System (DSS)* adalah suatu sistem pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi atau situasi semiterstruktur dan tidak terstruktur. dimana tak seorangpun tahu secara pasti bagaimana suatu keputusan itu dibuat (Adhar 2014)

Profil Matching merupakan suatu proses yang sangat penting dalam manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dimana terlebih dahulu ditentukan kompetensi (kemampuan) yang diperlukan oleh suatu jabatan. Kompetensi kemampuan tersebut haruslah dapat dipenuhi oleh pemegang atau calon yang akan dinilai kinerjanya. Dalam proses *Profil Matching* secara garis besar merupakan proses membandingkan antara kompetensi individu kedalam kompetensi jabatan beberapa kriteria seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang baik. Sistem pengambilan keputusan ini dibangun untuk membantu perusahaan dalam proses Pemindahan Pegawai yang memiliki kinerja baik. Pemindahan Pegawai yang berkinerja baik akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. (Udyana 2013)

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Pariaman, yang mana tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Pariaman, yakni membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan. Berdasarkan hal tersebut, secara mendetail tugas dan fungsi dari Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Pariaman adalah merencanakan, mengkoordinasikan dan mengkaji program-program, menyelenggarakan penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah dan sarana prasarana institusi Pemberdayaan Masyarakat Desa.(Kantor BPMD)

Pemindahan karyawan biasanya bertujuan untuk menempatkan karyawan pada tempat yang setepat nya dan agar karyawan yang bersangkutan mendapatkan kepuasan kerja yang tinggi sehingga dapat memberikan prestasi yang maksimal.

Masalah yang penulis teliti adalah tentang Pemindahan Pegawai yang sesuai dengan kriteria yang ada.Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka masalah yang akan disajikan atau diteliti dalam skripsi dan juga sebagai data atau bahan informasi bagi penulisan dalam menyusun Tugas Akhir (skripsi), penulis merasa tertarik dan mengambil judul“**Sistem Pendukung Keputusan Penerapan Metode Profil Matching Pada Mutasi Pegawai**”.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sistem pendukung keputusan pada Pemindahan Pegawai sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemindahan pegawai di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Pariaman?
2. Bagaimana menerapkan metode *Profil Matching* dalam sistem pengambilan keputusan Pemindahan Pegawai?
3. Bagaimana pelaksanaan atau penerapan metode *Profil Matching* dalam sistem pengambilan keputusan Pemindahan Pegawai?

1.3 Hipotesa

Hipotesa merupakan dugaan sementara yang akan diteliti dan dibuat. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dibuat hipotesa yang akan mengatasi masalah dalam proses Pemindahan Pegawai seperti yang di harapkan.

1. Pemindahan karena keinginan perusahaan dapat terjadi karena, untuk menjamin bahwa kepercayaan pegawai bahwa mereka tidak akan diberhentikan karena kekurangan kecakapan dalam jabatan yang lama, untuk mengurangi rasa bosan pegawai karena dianggap terlalu lama memegang jabatan yang sama.
2. Sistem pendukung keputusan menggunakan metode *profil matching* dalam memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan didalam Pemindahan Pegawai.

1.4 Batasan Masalah

Kami memberikan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Hal ini dilakukan agar penelitian ini terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, kami membatasi pada proses Pemindahan Pegawai hanya kursus pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Pariaman, bukan untuk keseluruhan perusahaan atau instansi – instansi.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan penyusunan dari laporan penelitian ini adalah :

1. Menerapkan metode *profil matching* sebagai salah satu metode sistem pendukung keputusan pemecahan suatu masalah dengan membuat rancangan sistem.
2. Perancangan sistem pendukung keputusan terkomputerisasi yang mampu membantu pihak perusahaan atau instansi – instansi yang terkait.
3. Membantu dalam pemilihan pemindahan pegawai di dalam instansi.

1.6 Manfaat Penelitaan

Adapun manfaat sistem pendukung keputusan pemindahan pegawai ini adalah :

1. Membantu perusahaan atau kantor dalam proses pemindahan pegawai.
2. Menerapkan metode *Profil Matching* sebagai salah satu metode pendukung keputusan pemecahan suatu masalah.

1.7 Tinjauan Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Mengacu kepada Peraturan Walikota Pariaman Nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan dan Organisasi dan tata kerja BPMD Kota Pariaman maka dapat diuraikan beberapa tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Pariaman, yakni membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan. Berdasarkan hal tersebut, secara mendetail tugas dan fungsi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Pariaman adalah merencanakan, mengkoordinasikan dan mengkaji program-program, menyelenggarakan penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah dan sarana prasarana institusi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sedangkan tugas pokoknya adalah :

**MEMBANTU WALIKOTA DALAM MELAKSANAKAN SEBAGIAN
URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH DI BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**

Gambar 1.1 Tugas Pokok

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Pariaman memiliki fungsi sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan penyelenggara pelayanan teknis administratif ketatausahaan dan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- 2) Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan lembaga dan keswadayaan masyarakat, desa dan kelurahan;
- 3) Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
- 4) Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- 5) Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penanggulangan kemiskinan;
- 6) Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan, prasarana/sarana dan pemberdayaan kawasan pedesaan;
- 7) Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
- 8) Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan;
- 9) Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan di bidang kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- 10) Pengelolaan tatausaha Badan.

1.7.1 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Visi :

“Terwujudnya Peran Aktif Masyarakat Kota Pariaman Melalui Koordinasi dan Keterpaduan Menuju Masyarakat Mandiri Yang Islami”

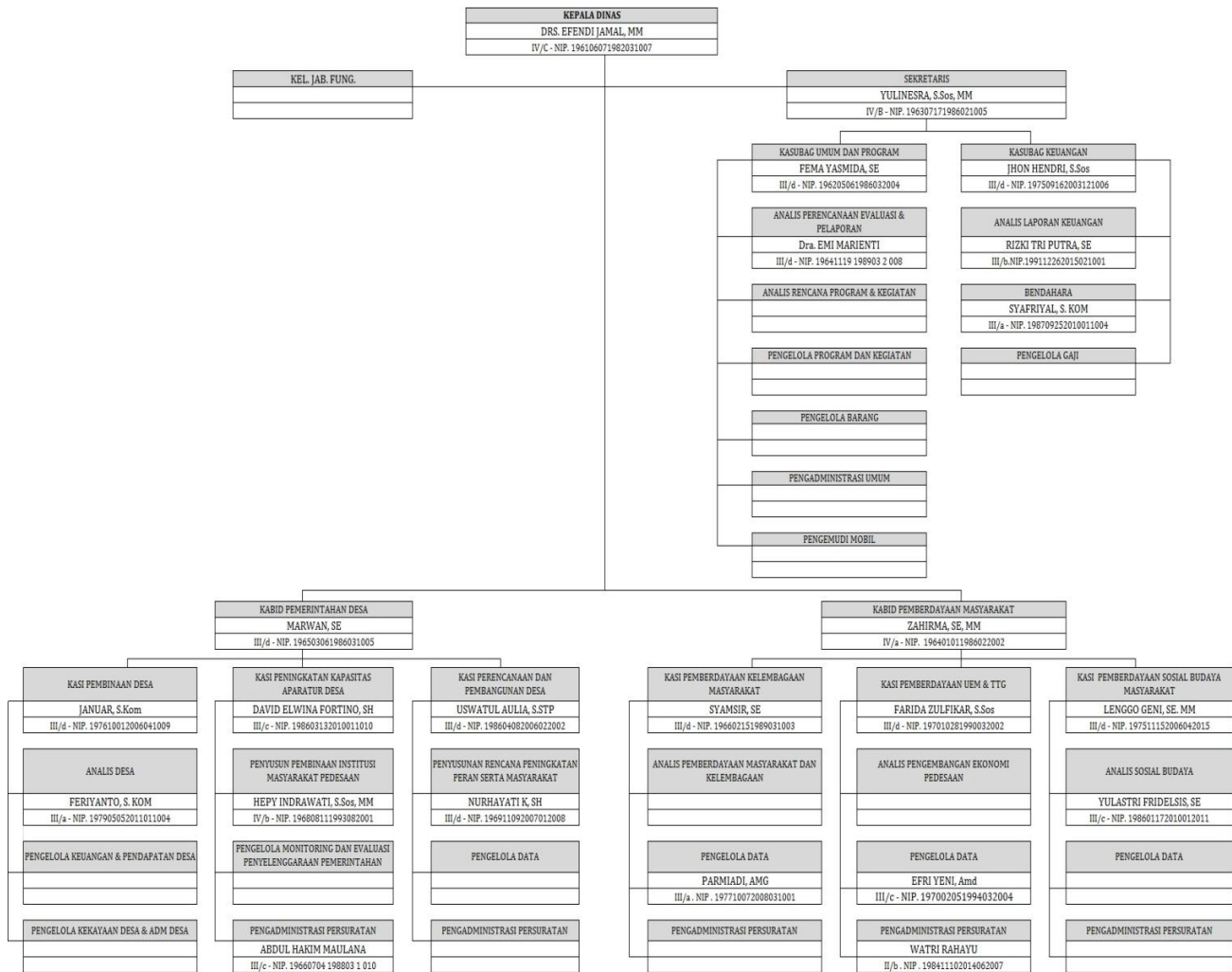
Misi :

1. Lanjutkan Sekolah Gratis
2. Lanjutkan Berobat Gratis
3. Adakan Bus Sekolah Gratis
4. Bangun Masjid Agung Kota Pariaman
5. Bangun Stadion Olah Raga Bertaraf Internasional
6. Bangun Resort Wisata Pantai

1.7.2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Berdasarkan :

Perda No. 12 tahun 2019



Gambar 1.2 Struktur Organisasi

1.7.3 Tugas dan Fungsi

1. Sekretariat;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam bidang pelayanan teknis administrasi seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang meliputi urusan Perencanaan, Program, Pelaporan, Kepegawaian, Keuangan dan urusan Umum dan Perlengkapan. Sekretariat dikepalai seorang Sekretaris, dan membawahi 2 (dua) Kepala Sub. Bagian yaitu :

1. Kepala Sub. Bagian Program dan Pelaporan
2. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Sub. Bagian Keuangan

2. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;

Mempunyai tugas pokok merumuskan perencanaan, melaksanakan kebijakan, pembinaan, koordinasi, pengembangan sarana usaha, produksi dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam serta penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan evaluasi sektor perekonomian.

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai 2 (dua) Sub. Bidang yang dikepalai oleh Kepala Sub. Bidang, yaitu :

1. Kepala Sub. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat
2. Kepala Sub. Bidang Teknologi Tepat Guna

3. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya;

Mempunyai tugas pokok merumuskan perencanaan, melaksanakan kebijakan, pembinaan, koordinasi, pengembangan kelembagaan dan sosial budaya serta penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi kelembagaan dan sosial budaya.

Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya dikepalai seorang Kepala Bidang dan mempunyai 2 (dua) Sub Bidang yang dikepalai Kepala Sub. Bidang, yaitu:

1. Kepala Sub. Bidang Kelembagaan
2. Kepala Sub. Bidang Sosial Budaya

4. Bidang Pemerintahan Desa;

Mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan pelayanan serta penyelenggaraan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Desa/Kelurahan. Bidang Pemerintahan Desa dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai 2 (dua) Sub. Bidang yaitu :

1. Kepala Sub. Bidang Pendapatan Desa/Kelurahan
2. Kepala Sub. Bidang Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan